

Eksperimentasi Muhammadiyah dalam Politik Elektoral: Suatu Keharusan

Tunjung Sulaksono

A. Posisi Politik Muhammadiyah

Perjuangan Muhammadiyah adalah perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perjuangan Muhammadiyah tersebut dilaksanakan melalui gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di seluruh lapangan kehidupan baik pada level perseorangan maupun masyarakat. Ditinjau dari struktur konsepsinya, pada hakekatnya perjuangan Muhammadiyah merupakan operasionalisasi strategis dari Khittah Muhammadiyah. Khittah atau garis perjuangan Muhammadiyah adalah landasan atau pola dasar Muhammadiyah dalam bertindak yang di dalamnya berisikan rumusan, teori, metode, strategi serta pemikiran Muhammadiyah dalam berjuang yang sifatnya dinamis. Sedangkan dilihat dari substansinya, Khittah Perjuangan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai teori perjuangan, yakni sebagai kerangka berfikir untuk memahami dan memecahkan persoalan yang dihadapi Muhammadiyah sesuai dengan gerakannya dalam konteks situasi dan kondisi yang dihadapi.

Khittah Ujung Pandang (1971) barangkali merupakan khittah yang paling sering dirujuk sebagai pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap organisasi Muhammadiyah dalam berpolitik. Poin pertama dari khittah perjuangan ini menyatakan, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari satu partai atau organisasi apa pun. Kedua, setiap anggota Muhammadiyah dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari AD, ART, dan ketentuan lain dalam persyarikatan.

Di dalam Khittah Denpasar (2002), sikap Muhammadiyah terhadap politik dipertegas. Pertama, melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kenegaraan (*real politics*) sebagaimana dilakukan oleh kekuatan politik lainnya. Kedua, kegiatan politik tidak langsung (*high politics*) yang bersifat memengaruhi kebijakan negara dalam perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat bangsa dan negara. Politik nilai, politik alokatif, atau yang kadang disebut sebagai *high politics* itu adalah politik yang

mendistribusikan nilai-nilai Islami dan moral ke dalam proses politik sebagai dakwah amar ma'rif nahi munkar, yaitu usaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran dan meninggalkan kemunkaran (Nashir, 2006: 105). Pada poin 6 dari 9 poin yang ada juga ditegaskan kembali bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik maupun organisasi mana pun.

Dengan demikian jika kemudian muncul pertanyaan, apakah Muhammadiyah berpolitik? Maka jawabannya adalah: tentu saja! Namun yang harus dipahami adalah metode berpoliticnya Muhammadiyah berbeda dengan metode berpoliticnya partai politik dalam politik elektoral. Karena Muhammadiyah merupakan gerakan non-politik, keterlibatannya berbeda dengan organisasi lain yang menjadikan politik sebagai profesinya (Alfian, 1989).

Sebagaimana diatur dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah; Kepribadian Muhammadiyah; Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah; Khittah Perjuangan Muhammadiyah; Khittah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, serta Keputusan-Keputusan Muktamar dan Tanwir-nya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, dan amar ma'rif nahi munkar yang bersifat nonpolitik. (Thohari, 2015). Meskipun seakan-akan dibatasi, akan tetapi posisi politik seperti ini bukan membelenggu, namun justru memberikan fleksibilitas luar biasa kepada Muhammadiyah dalam berpolitik.

B. Muhammadiyah dalam Politik Elektoral

Dalam politik elektoral, partai adalah institusi yang paling berpengaruh. Lewat pemilihan umum, partai-partai politik akan memproduksi kekuasaan politik dengan menempatkan kader-kadernya dalam konstelasi politik. Sebagai manifestasinya, hari ini, di Indonesia nyaris tidak ada jabatan publik tanpa intervensi partai politik baik di ranah legislatif maupun eksekutif, di level pusat maupun daerah. Dengan demikian dalam politik elektoral partai politik menjadi kendaraan politik yang paling efektif untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang membawa dampak bagi seluruh masyarakat. Kebijakan publik yang tepat akan secara efektif menyelesaikan persoalan-persoalan publik dan menjadi solusi permasalahan bangsa.

Meskipun posisi Muhammadiyah dalam politik sudah jelas sebagaimana digambarkan pada bagian awal tulisan ini, akan tetapi situasi politik nasional pada akhirnya menjadi variabel independen yang menentukan sejauh mana persentuhan Muhammadiyah dengan politik elektoral

atau partai politik. Sebagai ilustrasi, pada masa awal kemerdekaan Muhammadiyah pernah menjadi anggota istimewa dari Partai Masyumi (Siregar, 2013:91). Posisi politik umat Islam yang dipandang tidak menguntungkan yang mendorong Muhammadiyah menjadi bagian dari partai politik. Masuknya tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo dalam Majelis Syuro Masyumi semakin menegaskan hubungan erat antara keduanya. Bahkan pada waktu itu Muhammadiyah sempat punya semboyan: Berpolitik dengan Masyumi, Berdakwah dengan Muhammadiyah. (Qodir dkk., 2015:2). Pada awal Orde Baru, Muhammadiyah juga turut membidani berdirinya Parmusi, partai yang dianggap sebagai penerus Masyumi.

Kelahiran Partai Amanat Nasional beberapa saat pasca runtuhnya Orde Baru pun bagaimanapun terlalu susah disangkal dilahirkan dari rahim Muhammadiyah. Meskipun sering disebut sebagai hasil ijtihad politik Amien Rais, keputusan mendirikan PAN sendiri lahir dari keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah antara tanggal 5 sampai 7 Juli 1998 di Semarang (Syahputra, 2014:13). Meskipun banyak kader Muhammadiyah yang mengisi jajaran kepengurusan PAN, dan hingga hari ini PAN masih dianggap “rumah politik” oleh warga Muhammadiyah, akan tetapi tidak ada hubungan organisatoris antara Muhammadiyah dengan PAN.

Pasca pendirian PAN, bukan berarti eksperimentasi Muhammadiyah dalam politik elektoral berakhir. Keputusan Muspimwilsus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk memilih anggota DPD yang berafiliasi kepada Muhammadiyah menunjukkan masuknya Muhammadiyah dalam politik elektoral. Dukungan beberapa pimpinan daerah Muhammadiyah terhadap kandidat-kandidat tertentu yang bertarung dalam pilkada seperti di Sleman dan Maros (Nurmandi, dkk, 2015; Sholikin, 2015), juga memperkuat argumentasi bahwa Muhammadiyah tidak pernah sama sekali lepas dari politik elektoral.

C. Melembagakan Pola Relasi Persarikatan dengan kader Persarikatan di Partai

Ketika Muhammadiyah berani memproklamirkan dirinya sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar dalam level individual maupun masyarakat, maka pada saat itu pula Muhammadiyah harus menyadari bahwa dirinya tidak dapat lepas dari politik elektoral begitu saja. Kekuatan aktor-aktor politik yang bermain dalam pemilu yang nanti akan menghasilkan parlemen yang menghasilkan kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat harus menjadi perhatian Muhammadiyah. Tidak cukup sekedar memberikan dukungan kepada

kandidat DPD atau kepala daerah melalui keputusan musyawarah pimpinan, namun perjuangan politik Muhammadiyah perlu diperkuat dengan keberadaan kader-kader Muhammadiyah dalam lembaga-lembaga legislatif di level pusat maupun daerah, sehingga kebijakan-kebijakan publik yang muncul bisa lebih selaras dengan tujuan Muhammadiyah.

Tidak masalah jika kader-kader terbaik Muhammadiyah berdiaspora ke berbagai partai politik yang tidak bertentangan dengan arah perjuangan Muhammadiyah. Biarkan mereka mengeksplorasi dan bereksperimentasi dengan perjuangan lewat jalur politik elektoral, karena Muhammadiyah tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana. Yang kemudian perlu difikirkan adalah bagaimana Muhammadiyah memastikan agar secara insitusional keputusan Muhammadiyah dalam memberikan dukungan kepada kandidat eksekutif maupun legislatif tetap selaras dengan khittah. Demikian juga harus dilembagakan bagaimana kader-kader potensial yang sedang mengkesplorasi eksperimentasi elektoral tersebut tetap berperilaku politik secara santun sesuai warna Muhammadiyah, tetap “direngkuh” oleh ikatan-ikatan dan ghirah ber-Muhammadiyah, maupun tetap kontribusi terhadap perserikatan. Merumuskan formula tentang hal-hal itu tentu bukan hal yang mudah. Namun kemampuan Muhammadiyah untuk *survive* dalam berbagai rezim selama ini memunculkan keyakinan bahwa Muhammadiyah akan mampu mengelola pola relasi tersebut sehingga tetap sejalan dengan khittah Muhammadiyah.

Referensi

- Alfian (1989), *Islamic Modernism in Indonesian Politics, the Muhammadiyah Movement during the Dutch Colonial Period 1912-1942* (1989), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nashir, Haedar. (2006) *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Malang: UMM Press
- Nurmandi, Achmad, David Efendi, dan Andi Luhur Priyanto (2015), *Politik Elektoral Muhammadiyah di Arasy Lokal (Di Kabupaten Sleman dan di Kabupaten Maros)*, dalam Qodir, Zuly, Achmad Nurmandi, Nurul Yamin, (2015) *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Qodir, Zuly, Achmad Nurmandi, dan Nurul Yamin, (2015) *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sholikin (2015) *Deviasi Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah antara Pusat dan Daerah (Studi Kasus Sikap Politik Elite Muhammadiyah pada Pilihan Presiden 2014 dan Pilkada 2010 di*

Sleman dan Maros), Tesis S2 Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: UGM

Siregar, Insan Fahmi (2013) Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi(1945-1960) *Thaqafiyat* Vol. 14 No. 1

Syahputra, Hikmawan (2014), Peran Politik Muhammdiyah Tahun 2010-2014, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*, edisi September

Thohari, Hajriyanto, (2015), *Muhammadiyah Berpolitik*, Republika, 7 Mei.